

BAB I

PENDAHULUAN

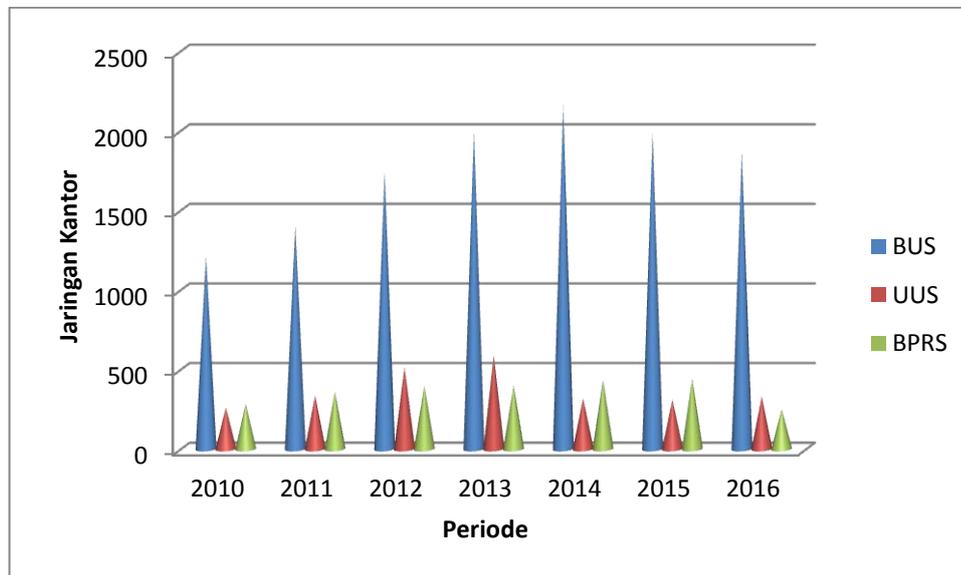
A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana bank sebagai stabilisator moneter berfungsi untuk menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, serta harga barang-barang. Bank juga sebagai dinamisator yaitu bank menjadi pusat perekonomian, sumber dana, lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan dan pendorong kemajuan perdagangan nasional maupun internasional (Hasibuan, 2005).

Bank juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Sjahdeini, 1999). Dengan kata lain, bank dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*) (Iswardono, 1997).

Pendirian bank syariah bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2005). Setiap tahun jumlah perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah

(UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan kuantitas bank syariah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2016, diolah

Gambar 1.1.

Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia

Pada gambar di atas, terlihat bahwa jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berkembang secara fluktuasi dalam 7 tahun terakhir. Jaringan kantor yang dimiliki BUS adalah paling banyak dibandingkan dengan jaringan kantor UUS maupun BPRS. Pada tahun 2016 jumlah jaringan kantor BUS sedikit menurun dari tahun sebelumnya menjadi 1.869 kantor, sementara jumlah jaringan kantor UUS 332 kantor dan jumlah jaringan kantor BPRS 253 kantor.

Peningkatan yang terjadi pada jumlah jaringan kantor bank tentu akan disertai oleh peningkatan modal, sehingga akan meningkatkan kemampuan bank untuk melakukan perluasan jaringan. Meningkatnya jangkauan pelayanan akan

mendorong tingkat kemampuan bank dalam menghimpun dana dari nasabah. Akan tetapi laju perkembangan jaringan kantor bank syariah mulai mengalami perlambatan pada tahun 2013, khususnya UUS yang akan diwajibkan *spin off* pada tahun 2023 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009). Perlambatan ini tentu sangat berpengaruh kepada kemampuan pengembangan penghimpunan dana perbankan syariah.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank tentu saja memiliki keterkaitan dengan baiknya kinerja suatu bank. Kinerja suatu bank tersebut dapat diukur dengan cara mengevaluasi dan menganalisis laporan keuangan. Kinerja perbankan syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.

Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah Tahun 2014-2016

Indikator	2014		2015		2016	
	BUS	UUS	BUS	UUS	BUS	UUS
Aset (Miliar)	204.961	67.383	213.423	82.839	254.184	102.32
DPK (Miliar)	170.723	47.136	174.895	56.28	206.407	72.928
Pembiayaan (Miliar)	147.944	51.386	153.968	59.028	177.482	70.525
FDR (%)	86,66	109,02	88,03	104,88	85,99	96,7
NPF (%)	4,95	2,55	4,84	3,03	4,42	3,49
BOPO (%)	96,97	80,19	97,01	83,41	96,23	82,85

Sumber: Statistik Perbankan syariah 2016, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kinerja perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Diketahui bahwa nilai aset, dana pihak ketiga (DPK) maupun pembiayaan terus meningkat secara signifikan, artinya kinerja perbankan syariah semakin baik. Berbeda dengan indikator NPF atau kredit bermasalah berkembang secara

fluktuatif dan terus meningkat dari tahun ketahun, artinya tingkat kredit bermasalah bank semakin tinggi, hal ini berdampak pada kualitas pembiayaan bank syariah akan semakin menurun meskipun angkanya masih berada dibawah 5 persen. Bank Indonesia (2008) menerangkan bahwa bank yang memiliki tingkat NPF dibawah 5 persen, kinerjanya tergolong relatif baik. Indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau rasio pembiayaan bank terjadi fluktuasi. Indikator BOPO juga mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak efisien.

Efisiensi menjadi salah satu indikator untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pada keuangan perbankan. Tujuan utama dari analisis efisiensi perbankan khususnya Unit Usaha syariah adalah untuk meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi, maupun daya saing industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satu kegiatan penting yang menjadi titik fokus dalam pengembangan perbankan nasional adalah peningkatan pada efisiensi operasi bank. Oleh karena itu efisiensi sangat berkaitan dengan skala ekonomis, penggunaan teknologi pendukung, produktivitas sumber daya manusia, dan menerapkan pola-pola kerja sama/aliansi strategis yang mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan mobilisasi dan penyaluran dana (Machmud dan Rukmana, 2010).

Efisiensi menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perusahaan. Efisiensi sering diartikan bagaimana suatu perusahaan dapat memproduksi dengan biaya serendah mungkin, tetapi tidak sekedar itu efisiensi juga menyangkut pengelolaan hubungan *input* dan *output* yaitu bagaimana mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia secara

optimal. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi jika dengan jumlah *input* tertentu dapat menghasilkan jumlah *output* lebih banyak atau pada jumlah *output* tertentu bisa menggunakan *input* lebih sedikit (Abidin dan Endri, 2008).

Efisiensi itu sendiri bukan masalah yang baru dalam dunia penelitian, baik efisiensi pada industri manufaktur, jasa maupun efisiensi pada lembaga keuangan, terutama sektor perbankan. Penelitian ini akan mengukur tingkat efisiensi unit usaha syariah dengan mengambil objek penelitian yaitu Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan satu-kesatuan dari industri perbankan nasional, pada dasarnya BPD adalah bank milik pemerintah masing-masing setiap daerah (pemda). Pada Desember 2016, tercatat sebanyak 27 BPD dengan jumlah kantor sebanyak 4.052 yang tersebar se-Indonesia. Memiliki total aset sebesar Rp529,746 miliar atau meningkat sebesar 10,20 persen dibandingkan posisi Desember 2015 yang mencapai Rp475,696 miliar (Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2016). Dengan jumlah aset yang cukup besar ini tentunya pemerintah daerah memiliki harapan yang besar terhadap peran BPD dalam meningkatkan pembangunan dan laju perekonomian di daerah yang bersangkutan. Di sisi lain BPD harus bersaing dengan kelompok bank umum lainnya yang semakin agresif menjalankan fungsi intermediasinya di daerah.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta merupakan sebuah bank BUMD yang berada di daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan akta notaris nomor 11, notaris R.M. Soerjanto

Partaningrat. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976, BPD DIY diatur sebagai suatu perusahaan daerah untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu akan dilakukan berbagai bentuk penyesuaian. Saat ini yang menjadi landasan hukum pendirian BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Pendirian bank itu sendiri bertujuan untuk membantu laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah serta menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (<http://www.bpddiy.co.id>)

Akhir tahun 2016 BPD DIY telah memiliki 69 kantor pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta terdiri dari 6 kantor cabang, 1 kantor cabang syariah, 31 kantor cabang pembantu, dan 31 layanan syariah (laporan tahunan bpddiy 2016). Bertambahnya kantor pelayanan BPD DIY juga diiringi dengan peningkatan kinerja BPD DIY itu sendiri, baik dari segi aset, DPK, beban operasional, pembiayaan maupun pendapatan operasional seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2.

Perkembangan Kinerja BPD DIY Tahun 2014-2016

Indikator	2014	2015	2016
Aset (Juta)	7.821.133	8.689.887	9.739.527
DPK (Juta)	6.368.034	6.841.380	7.380.198
Pembiayaan (Juta)	575.896	663.446	687.162
FDR (%)	80,34	80,99	80,84
NPF (%)	1,23	1,23	3,4
BOPO (%)	72,64	71,89	70,15

Sumber: www.bpddiy.co.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja BPD DIY dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan terlihat pada aset, DPK maupun pembiayaan. Dimana nilai aset bank pada tahun 2014 telah mencapai Rp7.821.133.000.000,00, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp8.689.887.000.000,00 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp9.739.527.000.000,00. Begitu juga dengan DPK pada tahun 2014 telah mencapai Rp6.368.034.000.000,00, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp6.841.380.000.000,00 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp7.380.198.000.000,00. Disamping itu pembiayaan pada tahun 2014 telah mencapai Rp575.896.000.000,00 kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp663.446.000.000,00 dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp687.162.000.000,00.

Namun dilihat indikator kredit bermasalah atau dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF) juga meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 2,17 persen, hal ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah bank semakin tinggi. Indikator *Financing Deposite Ratio* (FDR) yaitu rasio pembiayaan terhadap pendanaan masih tergolong rendah. Berbanding terbalik dengan indikator BOPO yang mengalami penurunan walaupun angkanya masih tinggi, ini menunjukkan bahwa bank tersebut mengarah kepada tingkat efisien.

Januari 2007 BPD DIY membentuk Unit Usaha Syariah dengan satu kantor cabang syariah, berada di jalan Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta. Kantor cabang syariah tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pembukaan UUS BPD DIY ini mampu memperluas produk dan jasa Bank BPD DIY (<http://www.bpddiy.co.id>)

Efisiensi dapat dilakukan dengan cara memperhatikan pertumbuhan kinerja bank melalui indikator jumlah simpanan, pembiayaan, dan jumlah aset. Ketika semakin besar jumlah pembiayaan yang dilakukan bank, hal itu menunjukkan bahwa bank berkembang secara produktif dalam melakukan kegiatan operasinya dan semakin optimal dalam mengelola dananya (Wahyuni, 2015). Keuntungan diperoleh dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tersebutlah yang disebut pendapatan operasional. Oleh karena itu yang menjadi variabel *output* dalam penelitian ini adalah pembiayaan dan pendapatan operasional.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang dihimpun dalam kegiatan operasi suatu bank dan menjadi tolok ukur atas keberhasilan bank jika mampu mengoptimalkan pembiayaan operasinya dari sumber dana ini. Beban operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk semua biaya operasional usaha dalam suatu perusahaan. Setiap bank memiliki simpanan, pembiayaan ataupun investasi untuk kegiatan operasionalnya. Tanpa simpanan, bank tidak akan mampu melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu simpanan/dana pihak ketiga (DPK), beban operasional serta total aktiva merupakan variabel *input* dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-parametrik yaitu *Data Envelopment Analysis* (DEA), alasan memilih pendekatan non-parametrik adalah karena pendekatan ini tidak menetapkan syarat-syarat tertentu dan lebih mudah serta sangat sederhana dalam menggunakannya dikarenakan tidak membutuhkan banyak spesifikasi, sehingga kemungkinan kesalahan dalam pembentukan fungsi akan lebih kecil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efisiensi Unit Usaha Syariah Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Studi Kasus BPD Yogyakarta Tahun 2010-2017)**”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Peneliti ingin memfokuskan penelitiannya pada periode 2010-2010 (kuartal 1 tahun 2010 – triwulan 2 tahun 2017).
2. Peneliti hanya menggunakan variabel *input* berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), Aset dan Beban Operasional serta variabel *outputnya* adalah Pembiayaan dan Pendapatan Operasional.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi UUS BPD Yogyakarta dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila UUS BPD Yogyakarta inefisien?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi UUS BPD Yogyakarta dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan apabila UUS BPD Yogyakarta inefisien.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian Efisiensi Unit Usaha Syariah dengan Metode *Data Envelopment analysis* (DEA) pada BPD Yogyakarta dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Mengembangkan wawasan dan melatih kemampuan peneliti dalam menilai permasalahan efisiensi unit usaha syariah dengan metode DEA sebagai penerapan ilmu yang diperoleh peneliti di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi terkait pengukuran efisiensi unit usaha syariah dengan metode DEA dan dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi penelitian berikutnya.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya BPD Yogyakarta untuk selalu meningkatkan efisiensinya sejalan dengan kebijakan yang berlaku.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah untuk melakukan transaksi di perbankan syariah di seluruh Indonesia khususnya di BPD Yogyakarta.